

BAB I

ANALISIS REKRUTMEN DAN KADERISASI PARTAI POLITIK PADA FENOMENA CALON TUNGGAL PETAHANA: STUDI KASUS PILKADA KABUPATEN PATI 2017

1.1 Latar Belakang

Prosesi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Pati tahun 2017 sangatlah menarik untuk dikaji karena hanya diikuti satu pasang calon yang harus bersaing dengan kotak kosong. Meskipun dalam aturan yang berlaku yaitu pada Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada telah mengatur apabila dalam Pilkada hanya diikuti satu pasang calon adalah hal yang legal tetapi Pilkada yang hanya diikuti satu pasang calon bukanlah Pilkada yang kompetitif. Melalui penelitian ini, penulis mencoba untuk mengetahui secara mendalam faktor-faktor yang mengakibatkan fenomena munculnya calon tunggal petahana yang harus melawan kotak kosong pada Pilkada Pati 2017. Fenomena tersebut dapat dikaitkan dengan proses kaderisasi dan rekrutmen partai politik di Kabupaten Pati. Keputusan delapan dari sembilan partai politik yang menduduki kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati untuk mengusung pasangan Haryanto dan Saiful Arifin patut untuk dikaji karena figur Haryanto dan Saiful Arifin sebenarnya bukanlah kader atau anggota partai manapun. Tindakan yang diambil oleh partai-partai itu membuat persaingan pada Pilkada Pati 2017

menjadi kurang ideal karena kandidat tunggal tersebut harus melawan kotak kosong.

Munculnya pilkada yang hanya diikuti oleh satu pasang calon tentu menimbulkan berbagai persepsi di masyarakat. Partai politik di daerah dinilai belum mampu menjalankan fungsi kaderisasi dan rekrutmen politik dalam mengusung calon kepala daerah. Meskipun, pada aturannya dalam Pilkada diperbolehkan mengajukan diri secara perorangan atau *independent* dengan berbagai ketentuan, salah satunya mempunyai dukungan 4,6% dari total daftar pemilih tetap (DPT) pada pemilu sebelumnya, tetap saja, pemeran utama yang harus dominan adalah partai politik karena Pilkada adalah agenda politik yang sangat strategis untuk memperoleh kekuasaan di daerah.

Fakta empirik ini timbul karena partai politik di Kabupaten Pati seakan lebih percaya dengan kekuatan Haryanto yang merupakan petahana. Faktor sosok Haryanto sebagai calon petahana dianggap sangat kuat karena sudah terlebih dahulu dikenal oleh masyarakat Pati, sehingga dianggap akan lebih mudah memenangi Pilkada. Hal ini merefleksikan rasa kurang percaya partai politik di Kabupaten Pati terhadap kader-kadernya atau mungkin memang partai tidak memiliki kader yang baik dikarenakan proses kaderisasi dan rekrutmen politik yang berjalan kurang optimal. Padahal, kaderisasi dan rekrutmen politik menurut Budiardjo (2008, hlm. 405) merupakan salah satu dari empat fungsi utama partai politik yaitu fungsi komunikasi politik, sosialisasi atau pendidikan politik, dan pengatur konflik.

Secara teoritis, di negara demokrasi partai politik relatif mampu menjalankan fungsinya sesuai harkat pada saat kelahirannya. Sebagaimana

Budiardjo (2008, hlm. 405) partai politik menjadi tempat bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam pengelolaan kehidupan bernegara dan memperjuangkan kepentingannya di depan penguasa. Hal ini berkebalikan dengan negara otoriter, dimana partai tidak dapat menunjukkan fungsi dan tujuannya, tetapi lebih banyak menjalankan kehendak penguasa.

Namun, secara praktis kondisi partai-partai politik di negara demokrasi belum dapat melaksanakan fungsinya secara optimal. Indonesia merupakan salah satu contohnya. Partai politik yang ada di Indonesia dinilai belum mampu menerapkan fungsi-fungsinya dengan baik. Kebanyakan partai politik di Indonesia pada umumnya memiliki masalah yang serius hampir seluruh aspek, mulai dari kapasitas organisasional hingga ideologi. Akibatnya sangat jelas, alih-alih menjalankan fungsi mediasi dan moderasi kepentingan konstituen, pendidikan politik, dan rekrutmen politik, kebanyakan partai politik lebih sibuk bertikai satu sama lain dan, lebih buruk dari itu, bertikai di internal anggota partai di hampir setiap kali mereka harus membuat kebijakan dan keputusan penting partai. (Meyer, 2008, hlm.22).

The Indonesian Institute (dalam Imansyah, 2012, hlm.2) menyatakan bahwa partai politik di Indonesia belum optimal dalam rekrutmen. Partai politik terindikasi gagal dalam menjalankan proses rekrutmen politik secara demokratis, transparan dan berbasis meritokrasi. Pengkaderan untuk internal partai seringkali dilakukan melalui cara-cara yang kental dengan kartelisme. Selain kartelisme, pragmatisme juga terjadi dan menyebabkan rusaknya perilaku elite partai, kader, dan konstituen partai. Munculnya oligarkhisme juga menyebabkan model kepemimpinan dan pengambilan keputusan partai,


serta adanya vaksionalisme juga semakin memperburuk organisasi partai. Dengan kondisi partai yang sedemikian rupa, tidak dapat diharapkan terciptanya ikatan ideologis dalam tubuh partai politik.

Persoalan ini juga terjadi di daerah. Sebagaimana contoh adalah Kabupaten Pati pada Pilkada 2017 memberi gambaran bahwa fungsi partai politik tidak berjalan dengan baik. Secara khusus penelitian ini fokus pada prosesi rekrutmen dan kaderisasi partai politik pada Pilkada Pati 2017 yang seakan tidak berjalan karena hampir semua partai politik mengukung pada satu pasang calon yaitu Haryanto dan Saiful Arifin yang sebenarnya bukanlah kader partai politik manapun.

Keputusan partai-partai politik untuk mengukung Haryanto dan Saiful Arifin secara politik dapat dikatakan menarik untuk dikaji mendalam, karena seharusnya partai politik mampu menjalankan proses kaderisasi yang berfungsi untuk menyiapkan kadernya menduduki jabatan strategis di internal partai ataupun menduduki jabatan strategis di pemerintahan mulai tingkat daerah hingga pusat. Tidak adanya kader partai politik yang diusung untuk berkontestasi pada Pilkada Pati 2017 ini menunjukkan bahwa partai-partai politik di Kabupaten Pati belum mampu melakukan proses kaderisasi, sehingga mereka lebih memilih mengukung orang yang bukan dari hasil proses kaderisasi paertai politik atau lebih memilih seseorang yang sudah dikenal masyarakat.

Sebenarnya jika melihat data hasil Pemilu Legislatif Kabupaten Pati Tahun 2014 secara implisit merefleksikan peta kekuatan partai politik di Kabupaten Pati. Pada data itu menunjukkan adanya partai yang mempunyai

kekuatan besar dan partai-partai yang kurang dominan. Ada 2 partai politik yang dapat dikatakan sangat kuat yaitu PDI Perjuangan dan Partai Gerindra yang memiliki 8 kursi di DPRD. PDI Perjuangan dan Partai Gerindra mampu mengungguli 10 partai politik lain pada setiap daerah pemilihan (dapil). Lebih lengkapnya dapat melihat tabel dibawah ini:



MODEL EB-5
Halaman 1

**REKAPITULASI PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK
DALAM PEMILU ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014**

KABUPATEN : PATI
PROVINSI : JAWA TENGAH

No	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN KURSI				JUMLAH KURSI PINDAHAN Hal 1
		DAPIL 1	DAPIL 2	DAPIL 3	DAPIL 4	
1	2	3	4	5	6	7
1	Partai NasDem	1	1	1	1	4
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1	1	2	1	5
3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	1	1	1	1	4
4	PDI PERJUANGAN	2	1	2	1	6
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	1	2	1	1	5
6	PARTAI GERINDRA	1	2	2	1	6
7	PARTAI DEMOKRAT	1	1	1	1	4
8	PARTAI AMANAT NASIONAL	-	-	-	-	-
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1	-	-	1	2
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	1	2	-	-	3
14	PARTAI BULAN BINTANG	-	-	-	-	-
15	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	-	-	-	-	-
JUMLAH		10	11	10	8	39



MODEL EB-5
Halaman 2

**REKAPITULASI PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK
DALAM PEMILU ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014**

KABUPATEN : PATI
PROVINSI : JAWA TENGAH

No	PARTAI POLITIK	JUMLAH KURSI PINDAHAN dari Hal 1	PEROLEHAN KURSI				JUMLAH KURSI
			DAPIL 5	11	12	13	
1	2	8	9	10	11	12	13
1	Partai NasDem	4	-	-	-	-	4
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	5	1	-	-	-	6
3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	4	1	-	-	-	5
4	PDI PERJUANGAN	6	2	-	-	-	8
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	5	1	-	-	-	6
6	PARTAI GERINDRA	6	2	-	-	-	8
7	PARTAI DEMOKRAT	4	2	-	-	-	6
8	PARTAI AMANAT NASIONAL	-	-	-	-	-	-
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	2	1	-	-	-	3
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	3	1	-	-	-	4
14	PARTAI BULAN BINTANG	-	-	-	-	-	-
15	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		39	11	-	-	-	50

PATI, 13 Mei 2014

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

1. MUCH. NASICH, S.Si
2. AHMAD JUKARI, S.Ag, MH
3. UMI NADIROH, S.Pd, M.Pd
4. SUPRIYANTO, SH
5. IMBANG SETIAWAN, ST

Ketua
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota



Sumber gambar 1.1.: Berita Acara KPU Kabupaten Pati tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Pati Pemilu 2014

Dari data tersebut dapat diuraikan perolehan kursi setiap partai di DPRD, PDI Perjuangan dan Partai Gerindra menjadi partai paling kuat dengan memperoleh kursi terbanyak yaitu 8 kursi, Golkar, Partai Demokrat dan PKB pada urutan kedua dengan memperoleh 6 kursi, PKS memperoleh 5 kursi, selanjutnya Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dan Partai Hanura mampu memperoleh 4 kursi, dan partai yang memperoleh kursi paling sedikit adalah PPP dengan 3 kursi,. Sedangkan 3 partai lainnya yaitu Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) sama sekali tidak memperoleh kursi karena suara yang diperoleh kurang dari ambang batas yang telah ditentukan di setiap dapil. Total keseluruhan jumlah kursi di DPRD Kabupaten Pati ada 50 kursi.

Berdasarkan pada aturan yang berlaku yaitu, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 tahun 2016, pada ayat 5 pasal ayat 2, yang juga senada dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 pasal 40 ayat 1 bahwa persyaratan menjadi calon kepala daerah harus memiliki dukungan dari partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Hal ini menunjukkan bahwa jika di Kabupaten Pati syarat kursi paling sedikit untuk maju menjadi calon kepala daerah adalah 20% dari 50 kursi DPRD atau minimal harus memiliki 10 kursi di DPRD. Hal ini berarti apabila satu partai politik memiliki kursi yang kurang dari 20% atau

10 kursi maka dapat melakukan koalisi dengan partai politik lain untuk melengkapi kekurangan jumlah kursi yang dimiliki.

Sesuai dengan fungsi dan perannya sebagai partai politik, PDI Perjuangan dan Partai Gerindra yang masing-masing memiliki 8 kursi seharusnya dapat memanfaatkan jumlah kursi yang mereka peroleh untuk mengusung kader-kadernya ikut berkontestasi pada Pilkada 2017 dengan menggandeng salah satu partai lain. Sedangkan partai-partai lain juga harusnya mampu mengusung kadernya sendiri dengan berkoalisi secara ideal dengan 1 atau 2 partai lainnya untuk melengkapi jumlah kursi minimal yaitu 10 kursi agar persaingan dalam Pilkada Pati 2017 berjalan lebih menarik. Namun ternyata partai-partai politik di Kabupaten Pati mayoritas hanya mencari posisi aman yang dianggap berpeluang besar untuk memenangi prosesi Pilkada dengan berkoalisi mengusung seorang petahana. Padahal jika melihat hasil Pemilu Legislatif 2014 partai-partai politik sebenarnya mempunyai basis massa masing-masing yang tersebar merata diseluruh Kabupaten yang seharusnya dapat dimanfaatkan sebagai pemilih untuk mendukung kader masing-masing partai politik.

Partai-partai politik yang memilih mengusung pasangan Haryanto-Arifin yaitu, dari Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Gerindra, PKS, PDI Perjuangan, PPP, PKB, dan Partai Hanura. Apabila diakumulasikan jumlah kursi DPRD yang dimiliki partai-partai pengusung itu adalah 46 kursi atau mencapai 92% dari total 50 kursi di DPRD Kabupaten Pati. Koalisi delapan partai politik untuk mengusung pasangan Haryanto-Arifin dapat disebut kurang ideal. Hanya ada satu partai yang memilih untuk tidak ikut berkoalisi

yaitu Partai Nasional Demokrat (Nasdem) yang hanya memiliki 4 kursi atau 8% dari seluruh kursi di DPRD Kabupaten Pati. Partai Nasdem yang hanya memiliki 4 kursi tentu tidak dapat mengusung calonnya sendiri karena berdasar ketentuan minimal adalah 20% atau sekitar 10 kursi. Pilkada Pati 2017 memunculkan persaingan yang kurang ideal karena hanya ada satu pasang kandidat yang pada akhirnya dilawankan dengan kotak kosong.

Selain faktor sosok Haryanto yang merupakan petahana dan bukan kader atau anggota dari partai politik manapun fenomena calon tunggal pada Pilkada Pati 2017 semakin menarik karena jika melihat pada beberapa sumber, partai-partai politik di Kabupaten Pati sebenarnya memiliki kader-kader potensial yang layak untuk diusung sebagai calon Bupati maupun calon Wakil Bupati. PDI Perjuangan dapat dikatakan partai yang memiliki kader potensial paling banyak, PDI Perjuangan memiliki sosok Imam Suroso yang saat ini menjadi anggota Komisi IX DPR-RI dan juga Endro Dwi Cahyono yang memiliki jabatan Bendahara Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah yang sempat mendaftar ke DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pati sebagai bakal calon Bupati, namun akhirnya mengikuti keputusan partai untuk ikut mendukung Haryanto-Arifin. Partai Gerindra juga memiliki kader potensial Sri Wulan yang saat ini menjadi anggota Komisi IV DPR RI. Partai Golkar juga memiliki Firman Subagyo yang saat ini menjadi anggota Komisi IV DPR RI. Partai Demokrat memiliki Kartina Sukawati yang saat ini menjabat Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Jawa Tengah yang juga mantan Wakil Bupati Pati periode 2006-2011. PKB memiliki Budiono yang merupakan Wakil Bupati Pati 2012-2017 dan

juga Ketua Dewan Syuro DPC PKB Kabupaten Pati. Sedangkan beberapa partai lain bisa dianggap belum memiliki kader potensial untuk Pilkada Pati 2017. Kader-kader potensial yang dimiliki partai-partai politik Kabupaten Pati tersebut seakan tak diutamakan oleh partainya sendiri karena partai-partai politik lebih memilih untuk mengusung Haryanto-Arifin meskipun keduanya bukan kader partai politik manapun.

Budiardjo (2008, hlm. 408) menyatakan bahwa fungsi partai sebagai sarana rekrutmen politik berkaitan erat dengan masalah seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan di internal partai maupun kepemimpinan nasional yang lebih luas. Pernyataan itu semakin dikuatkan oleh Fadjar (2013, hlm. 19) bahwa fungsi rekrutmen partai akan menjamin kontinuitas dan kelestarian partai, dan sekaligus salah satu cara untuk menyeleksi para calon pimpinan partai atau pimpinan bangsa. Dapat disimpulkan bahwa kaderisasi dan rekrutment partai politik adalah fungsi yang sangat penting. Partai politik harus mampu melahirkan sosok pemimpin-pemimpin baru yang disiapkan untuk tingkatan internal partai atau yang menduduki jabatan-jabatan strategis di tingkat daerah hingga pusat atau nasional. Kasus munculnya pasangan calon tunggal di Pilkada Pati 2017 yang didukung oleh 8 partai politik sangat menunjukkan adanya ketidaksempurnaan partai politik dalam menjalankan fungsi-fungsinya, khususnya dalam fungsi kaderisasi dan sarana rekrutmen politik. Partai politik di Kabupaten Pati dinilai belum mampu menyiapkan kader-kadernya untuk dijadikan kadidat pada Pilkada 2017.

Sikap politik 8 partai politik yang memilih untuk mengusung satu pasang calon yaitu Haryanto dan Saiful Arifin menarik untuk dikaji, partai-partai itu belum mampu menjalankan peran dan fungsinya sebagai sarana rekrutmen dan kaderisasi politik. Delapan partai politik itu seakan merasa belum mampu mengusung kader masing-masing atau berkoalisi sehat dan membuat persaingan yang ideal dalam Pilkada. Partai-partai politik itu seakan tidak percaya dengan kader yang mereka miliki dan lebih memilih untuk mengusung calon petahanan yang dianggap sudah lebih dikenal oleh masyarakat Kabupaten Pati. Fenomena ini sangat menarik untuk dikaji, faktor-faktor apa saja yang sangat berpengaruh harus diteliti secara mendalam, proses Pilkada yang mengharuskan calon tunggal bersaing dengan kotak kosong tentu bukanlah prosesi terbaik yang diinginkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, peristiwa politik semacam ini harus dicari penyebab utamanya serta dicari solusi terbaik untuk membuat partai politik di Indonesia mampu menjalankan fungsinya dengan optimal, utamanya dalam fungsi kaderisasi dan rekrutmen politik.

1.2. Rumusan Masalah

Prosesi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Pati tahun 2017 sangat menarik untuk diteliti karena dari 9 partai politik yang ada di DPRD Kabupaten Pati, 8 partai memutuskan untuk mengusung pasangan Haryanto-Arifin yang sebetulnya bukanlah kader partai. Fungsi kaderisasi dan rekrutmen politik partai-partai di Kabupaten Pati dianggap kurang

optimal. Pada akhirnya Pilkada Pati 2017 dilaksanakan dengan kandidat Haryanto-Arifin melawan kotak kosong. Dari kasus tersebut, maka penulis merumuskan masalah yang akan dikaji secara mendalam sebagai berikut:

1.2.1. Bagaimanakah fenomena calon tunggal petahana di Pilkada Kabupaten Pati dapat menjelaskan proses rekrutmen dan kaderisasi politik partai-partai politik di Kabupaten Pati?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara mendalam mengenai penerapan fungsi-fungsi utama partai politik, khususnya pada partai politik di Kabupaten Pati dalam mengusung kandidat kepala daerah. Penelitian ini dilakukan agar faktor-faktor yang mempengaruhi fenomena calon tunggal petahana dalam Pilkada dapat diketahui dengan baik. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan kajian-kajian tentang prosesi kaderisasi dan rekrutmen politik dalam Pilkada, agar fenomena Pemilu atau Pilkada yang hanya diikuti pasangan calon tunggal tidak akan terjadi lagi di Indonesia, khususnya di Kabupaten Pati.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian tentang proses kaderisasi dan rekrutmen partai-partai politik di Kabupaten Pati ini memiliki manfaat baik secara akademis dan juga manfaat praktis yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1.4.1. Kegunaan Akademis

Secara akademis penelitian ini diharapkan mampu memperkaya khasanah ilmu pengetahuan ilmu politik dan pemerintahan khususnya tentang partai politik di Indonesia, utamanya dalam menjalankan fungsi kaderisasi dan rekrutmen politik. Penelitian ini juga dapat dijadikan referensi untuk penelitian-penelitian berikutnya yang lebih baru mengenai fenomena calon tunggal dalam Pilkada serta hubungannya terhadap fungsi kaderisasi dan rekrutmen politik.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Bagi penulis, manfaat praktis yang diharapkan adalah bahwa seluruh tahapan penelitian serta hasil penelitian yang diperoleh dapat memperluas wawasan dan sekaligus memperoleh pengetahuan empirik mengenai penerapan fungsi kaderisasi dan rekrutmen partai politik di Kabupaten Pati. Bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian, penulis berharap manfaat hasil penelitian dapat diterima sebagai kontribusi untuk meningkatkan penerapan fungsi-fungsi partai politik sesuai dengan fungsi utamanya agar peluang munculnya masalah calon tunggal dalam setiap

Pemilu dapat dikurangi dan kontestasi dalam Pemilu atau Pilkada akan berjalan secara ideal.

1.5. Kerangka Teori

1.5.1. Partai Politik dan Fungsi Partai Politik

Partai politik

Partai Politik merupakan elemen penting dalam negara demokrasi. Melalui partai politik masyarakat dapat turut serta atau berpartisipasi dalam pengelolaan negara. Sebagai suatu lembaga politik, partai politik memiliki peran dan fungsi yang sangat penting untuk menjaga keberlangsungan demokrasi di suatu negara. Kurang sempurnanya penerapan peran dan fungsi partai politik maka akan menimbulkan masalah serius bagi suatu negara demokrasi.

Partai politik mulai lahir di negara-negara Eropa Barat. Mulai berkembangnya pemikiran bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan serta diikutsertakan dalam proses politik, membuat partai politik lahir secara spontan dan terus tumbuh menjadi penghubung antara rakyat dan pemerintah. Partai politik dianggap mampu menjadi wadah menyatukan orang-orang yang memiliki pemikiran serupa, sehingga orientasi

dan pemikiran mereka dapat dikonsolidasikan. Dengan cara itu maka pengaruh mereka bisa lebih besar dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan pemerintah. (Budiardjo, 2008, hlm. 403)

Budiardjo (2008, hlm. 403) memberikan pernyataan bahwa secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik merupakan suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan utama partai politik adalah memperoleh kekuasaan dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional.

Subakti (1992, hlm. 116) mendefinisikan partai politik sebagai adalah kelompok anggota yang terorganisasikan secara rapi dan stabil yang dipersatukan dan dimotivasi dengan ideologi tertentu, dan yang berusaha mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan melalui pemilihan umum guna melaksanakan alternatif kebijakan umum yang mereka susun. Selain itu juga Carl J. Friederich (dalam Subakti, 1992, hlm. 116) menyatakan bahwa partai politik adalah sekelompok masyarakat yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan kekuasaan pemerintahan oleh pemimpin partainya dan memberikan anggota partai lain manfaat baik secara idiil dan serta materiil. Sementra itu, Soltau (dalam Subakti, 1992, hlm. 116) memberikan pendapat bahwa partai politik adalah kelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisir dan bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih, bertujuan untuk menguasai pemerintahan dan menjalankan kebijakan umum yang mereka buat.

Sigmund Neumann (dalam Budiarto, 2008, hlm. 404) memberikan pernyataan bahwa partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan berbeda. Menurut Neumann, partai politik merupakan perantara besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga-lembaga pemerintah yang resmi. Sedangkan menurut Giovanni Sartori (dalam Budiarto, 2008, hlm. 404) partai politik adalah suatu kelompok politik yang mengikuti pemilihan umum, dan melalui pemilihan umum itu mampu menempatkan calon-calon untuk menduduki jabatan-jabatan publik.

J. A. Corry dan Henry J. Abraham (dalam Haryanto, 1984, hlm. 9) mengungkapkan pendapatnya bahwa partai politik merupakan suatu perkumpulan yang bermaksud untuk mengontrol jalannya roda pemerintahan dengan cara menempatkan para anggotanya pada jabatan-jabatan pemerintahan.

Syafie (2010, hlm. 326) partai politik merupakan sekelompok orang yang memiliki ideologi sama, berniat merebut dan mempertahankan kekuasaan (yang paling tepat menurut partai) dengan tujuan untuk memperjuangkan kebenaran dalam suatu level tingkat negara.

Undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan Undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik mendefinisikan partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh

sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dari berbagai definisi mengenai partai politik oleh ahli-ahli politik dan aturan perundangan yang berlaku dapat penulis simpulkan bahwa secara umum partai politik adalah sekelompok masyarakat yang memiliki pemikiran serta ideologi yang sama yang terorganisir dengan tujuan meraih dan mempertahankan kekuasaan secara demokratis. Partai politik juga memiliki berbagai peran dan fungsi yang beragam untuk memperoleh kekuasaan dan menjaga kestabilan demokrasi suatu negara. Partai politik juga berbeda dengan kelompok kepentingan (*interest group*). Kelompok kepentingan hanya bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan tertentu dengan mempengaruhi pembuat keputusan. Kelompok kepentingan biasanya berada diluar partai politik, yaitu berasal dari kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat.

Fungsi Partai Politik

Subakti (1992, hlm. 117) menyatakan bahwa fungsi partai politik terdiri dari 7 fungsi utama yang terdiri dari sosialisasi politik, rekrutmen politik, partisipasi politik, pemandu kepentingan, komunikasi politik, pengendalian konflik, dan fungsi kontrol politik. Semua fungsi itu dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Fungsi sosialisasi politik yang dimaksud adalah proses pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat. Melalui proses sosialisasi politik inilah para anggota masyarakat memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung dalam masyarakat.
2. *Fungsi rekrutmen politik* ialah seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau kelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya. Fungsi ini semakin besar porsinya manakala partai politik itu merupakan partai mayoritas dalam badan perwakilan rakyat sehingga berwenang membentuk pemerintahan dalam sistem politik demokrasi. Fungsi rekrutmen dianggap sebagai kelanjutan dari mencari dan mempertahankan kekuasaan. Selain itu, fungsi rekrutmen politik sangat penting bagi kelangsungan sistem politik sebab tanpa elit yang mampu melaksanakan perannya kelangsungan hidup sistem politik akan terancam.
3. Fungsi partisipasi politik ialah kegiatan warga negara biasa (bukan aktor politik ataupun pemerintah) mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan umum dan dalam ikut menentukan pemimpin pemerintahan.
4. Fungsi pemandu kepentingan merupakan kegiatan mengatur dan mengelola segala bentuk kepentingan. Berbagai macam

kepentingan masyarakat yang beraneka macam ditampung dan dipadukan dan kemudian diperjuangkan dalam proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik atau kebijakan publik.

5. Fungsi komunikasi politik ialah proses penyampaian informasi politik dari pemerintah kepada masyarakat dan dari masyarakat kepada pemerintah. Partai politik berfungsi sebagai komunikator politik yang tidak hanya menyampaikan segala keputusan dan penjelasan pemerintah kepada masyarakat.
6. Fungsi pengendali konflik yang dilakukan partai politik adalah mengendalikan konflik yang terjadi dengan cara berdiskusi dan berdialog dengan pihak-pihak yang berkonflik, menampung dan memadukan berbagai aspirasi dan kepentingan dari pihak-pihak yang berkonflik dan membawa permasalahan kedalam musyawarah badan perwakilan rakyat untuk mendapat penyelesaian berupa keputusan politik.
7. Fungsi sebagai kontrol politik ialah kegiatan untuk menunjukkan kesalahan, kelemahan dan penyimpangan dalam isi suatu kebijakan atau dalam pelaksanaan kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah. Dalam pelaksanaan kontrol politik atau pengawasan harus ada tolok ukur yang jelas sehingga kegiatan itu bersifat relatif objektif.

Meyer (2008, hlm. 33) juga mengungkapkan bahwa partai politik memiliki banyak fungsi, namun Meyer mengerucutkannya berbagai macam fungsi itu menjadi lima fungsi utama yang dianggap sangat penting yaitu :

1. Mengagregasikan kepentingan-kepentingan dan nilai-nilai dan berbagai kalangan masyarakat.
2. Menjajaki, membuat, dan memperkenalkan kepada masyarakat platform pemilihan umum parpol mereka.
3. Mengatur proses pembentukan kehendak politis (*'political will'*) dengan menawarkan alternatif-alternatif kebijakan yang lebih terstruktur.
4. *Merekrut*, mendidik, dan mengawasi staf yang kompeten untuk kantor public mereka dan untuk menduduki kursi di parlemen.
5. Memasyarakatkan, mendidik, serta menawarkan kepada anggota-anggotanya saluran mana yang efektif bagi partisipasi (keikutsertaan) politik mereka sepanjang masa pemilu.

Budiardjo (2008, hlm. 405) fungsi partai politik terbagi menjadi 4 fungsi utama yaitu sebagai sarana komunikasi politik, sarana sosialisasi politik, sarana rekrutmen politik dan sebagai sarana pengatur konflik. Penjabaran dari keempat fungsi tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Sarana Komunikasi Politik: Partai politik bertugas menyalurkan beragam aspirasi masyarakat dan menekan kesimpangsiuran pendapat

di masyarakat. Keberadaan partai politik menjadi wadah penggabungan aspirasi anggota masyarakat yang senada (*interest aggregation*) agar dapat di rumuskan secara lebih terstruktur atau teratur (*interest articulation*). Selanjutnya, partai politik merumuskan aspirasi tersebut menjadi suatu usulan kebijakan, untuk diajukan kepada pemerintah agar menjadi suatu kebijakan publik. Pada sisi lain, partai politik bertugas membantu sosialisasi kebijakan pemerintah, sehingga terjadi suatu arus informasi berkesinambungan antara pemerintah dan masyarakat.

2. *Sarana Sosialisasi Politik*: Dalam usahanya untuk memperoleh dukungan luas masyarakat, partai politik akan berusaha menunjukkan diri sebagai pejuang kepentingan umum. Oleh karena itu partai politik harus mendidik dan membangun orientasi pemikiran anggotanya (dan masyarakat luas) untuk sadar akan tanggungjawabnya sebagai warga negara. Proses tersebut dinamakan sosialisasi politik, yang wujud nyata dapat berbentuk ceramah penerangan, kursus kader, seminar dan lain-lain.
3. *Sarana Rekrutmen Politik*: Partai politik memiliki fungsi untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk aktif berpolitik sebagai anggota partai politik tersebut (*political recruitment*). Hal ini merupakan suatu usaha untuk memperluas partisipasi politik. Selain itu, rekrutmen politik yang di arahkan pada generasi muda potensial

menjadi sarana untuk mempersiapkan regenerasi kepemimpinan di dalam struktur partai politik.

4. Sarana Pengatur Konflik: Partai politik bertugas mengelola konflik yang muncul di masyarakat sebagai suatu akibat adanya dinamika demokrasi, yang memunculkan persaingan dan perbedaan pendapat.

Dari ketiga pendapat ahli tersebut bisa kita rangkum, setidaknya ada beberapa fungsi utama partai politik yaitu sebagai sarana sosialisasi politik, sebagai sarana komunikasi politik, sebagai sarana partisipasi politik, sebagai sarana rekrutmen politik, sebagai saran pemandu kepentingan, sebagai sarana kontrol politik dan sebagai sarana pengatur konflik. Lebih khususnya pada penelitian ini akan membahas mengenai fungsi rekrutmen dan kaderisasi partai politik, karena penelitian ini lebih terfokus kepada penerapan fungsi kaderisasi dan rekrutmen politik dengan studi kasus prosesi Pilkada Pati 2017.

1.5.2. Fungsi Rekrutmen dan Kaderisasi Partai Politik

Fungsi Rekrutmen

Suatu organisasi tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya prosesi kaderisasi dan rekrutmen yang berjalan dengan baik, begitu juga dengan partai politik. Sebagai suatu organisasi partai politik harus mampu

menjalankan proses kaderisasi dan rekrutmen politik yang baik agar eksistensi partai tetap terjaga serta mampu bersaing dengan partai politik lainnya. Dalam menyiapkan kader tentu partai politik akan memilih kader-kader terbaik untuk dijadikan pengelola partai ataupun menjadi kader yang diusung atau dicalonkan untuk menduduki jabatan politik baik itu kepala daerah ataupun anggota legislatif.

Sebelum menjadi kader partai politik, masyarakat yang ingin berpartisipasi menjadi kader tentu harus melalui prosesi tertentu. Prosesi inilah yang disebut dengan proses rekrutmen. Dalam penerapan fungsi rekrutmen ini biasanya setiap partai politik memiliki cara masing-masing. Meskipun, secara garis besar indikator dalam pemilihan kader partai politik di Indonesia cenderung tidak jauh berbeda. Tentu dalam proses rekrutmen akan disaring orang-orang terbaik yang dianggap layak menjadi kader partai politik.

Rekrutmen politik merupakan salahsatu fungsi partai politik yang berkaitan erat dengan masalah seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan internal partai (bertugas mengelola partai) dan kepemimpinan diluar partai atau kepemimpinan nasioal yang lebih luas. Untuk kepentingan partai setiap partai tentu membutuhkan kader-kader yang memiliki kualitas, karena hanya dengan adanya kader-kader yang berkualitas akan menjadikan partai politik lebih berkembang. Apabila kader-kader yang dimiliki berkualitas maka partai politik tidak akan kesusahan dalam memilih kadernya untuk bersaing menjadi pemimpin nasional. (Budiardjo, 2008, hlm. 408)

Pada tahapan rekrutmen, partai politik juga berkepentingan memperluas atau memperbanyak keanggotaan. Partai berusaha menarik anggota sebanyak-banyaknya dan mendirikan organisasi-organisasi masa yang melibatkann berbagai golongan masyarakat. Rekrutmen politik menjamin keberlanjutan dan kelestarian partai, sekaligus merupakan cara untuk menjaring dan melatik calon-calon pemimpin. Terdapat beberapa cara dalam rekrutmen politik diantaranya melalui kontak pribadi, persuasi dan lain sebagainya. (Budiardjo, 2008, hlm. 409)

Anggara (2013, hlm. 88) berpendapat bahwa rekrutmen politik itu terdiri dari dua kata, yaitu kata rekrutmen yang berarti penyeleksian dan politik yang berarti urusan kekuasaan negara. Jadi, rekrutmen politik adalah penyeleksian rakyat untuk melaksanakan urusan negara. Rekrutmen politik merupakan proses seleksi anggota-anggota kelompok untuk mewakili kelompoknya dalam jabatan-jabatan politik. Setiap sistem politik mempunyai sistem atau prosedur rekrutmen yang berbeda. Pola rekrutmen yang dianut oleh tiap partai politik berbeda-beda sesuai dengan sistem politik yang dianut di suatu negara tersebut.

Tujuan utama rekrutmen politik adalah memilih orang-orang yang dianggap layak untuk menjabat sebagai penyelenggara negara dari tingkat paling rendah hingga tingkat pusat. Objek rekrutmen politik ialah seluruh masyarakat karena semuanya memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 dan peraturan perundangan yang berlaku. Sesuai dengan pasal 27 ayat 2 UUD 1945 yang

menyatakan “Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan.” (Anggara, 2013, hlm. 90)

Sitepu (2012, hlm. 190) menjelaskan bahwa fungsi rekrutmen politik berkaitan erat dengan masalah seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan internal partai maupun kepemimpinan nasional yang sangat luas. Untuk kepemimpinan internalnya, setiap partai politik membutuhkan kader-kader berkualitas karena memiliki kemampuan yang lebih untuk dapat mengembangkan diri. Dengan kader yang berkualitas itulah partai tidak akan sulit menentukan pemimpinnya sendiri dan memiliki peluang yang cukup besar untuk mengajukan atau mengusung calonnya ke bursa pemimpin nasional.

Kaderisasi Partai Politik

Apabila fungsi rekrutmen lebih menekankan pada penjangkaran kandidat dalam Pilkada yang bebas, terlepas kandidat tersebut anggota partai ataupun bukan anggota, kaderisasi lebih menganggap bahwa kader atau anggota partai adalah orang-orang yang seharusnya dijadikan kandidat dalam setiap agenda demokrasi baik itu Pilkada ataupun pemilu legislatif. Kader partai politik harus diutamakan karena sudah dibekali pendidikan politik serta telah melalui berbagai prosesi kaderisasi yang dilakukan oleh partai politiknya.

Romli (2011, hlm. 208) Dalam setiap organisasi, anggota merupakan bagian paling utama. Dalam organisasi partai politik, peran anggota sangat dibutuhkan karena melalui para anggota ini akan menjadi juru bicara partai untuk menyuarakan dan menyebarluaskan program partai kepada masyarakat.

Selain itu, anggota merupakan sumber kaderisasi yang dapat melahirkan calon-calon pemimpin partai politik. Partai politik yang berkembang dengan baik akan melakukan kaderisasi dan pendidikan politik bagi anggota-anggotanya secara terus menerus. Tujuan dari kaderisasi dan pendidikan politik adalah untuk meningkatkan kualitas anggota sehingga nantinya mereka (para anggota) mampu menghadapi persoalan dan tantangan yang selalu berkembang dalam kehidupan politik masyarakat, bangsa, dan negara.

Kaderisasi dan pendidikan politik dilakukan oleh partai politik dalam rangka untuk mencetak pemimpin. Oleh karena itu, partai politik yang terlembaga akan melakukan pendidikan politik dan pelatihan kepemimpinan secara berkelanjutan. Pendidikan dan pelatihan ini dilakukan secara berjenjang sesuai dengan jenjang dan ruang lingkup masing-masing tingkatan kepengurusan. Melalui pendidikan dan pelatihan kepemimpinan ini, diharapkan nanti akan lahir kader pemimpin partai yang berkualitas. (Romli, 2011, hlm. 209)

Harjanto (2011, hlm. 158) menyatakan bahwa kaderisasi kepemimpinan di partai politik merupakan salah satu fungsi penting yang seharusnya mendapat prioritas karena partai politik masih menjadi saluran utama rekrutmen kepemimpinan di daerah dan nasional. Suatu partai politik yang dikelola dengan baik, tentunya akan dapat mengembangkan kapasitas untuk rekrutmen dan kaderisasi sehingga parpol dapat menjadi penyumbang tokoh-tokoh handal pemimpin baik untuk internal partai ataupun yang menduduki jabatan publik strategis.

Dari berbagai pandangan dan teori beberapa ahli mengenai rekrutmen dan kaderisasi politik yang merupakan salah satu fungsi utama partai politik tersebut, penulis menyimpulkan bahwa rekrutmen dan kaderisasi politik adalah proses pemilihan masyarakat yang ingin berpartisipasi politik secara aktif melalui partai politik, proses rekrutmen politik akan menghasilkan anggota kader-kader partai politik yang disiapkan untuk menjadi pemimpin internal partai ataupun pemimpin yang akan menduduki jabatan-jabatan publik, mulai dari eksekutif hingga legislatif. Rekrutmen politik erat kaitannya dengan proses kaderisasi partai politik karena dalam proses rekrutmen juga merupakan proses pendidikan politik dan kepemimpinan dalam menyiapkan kader-kader partai politik.

Jadi secara teoritis, dalam mengusung suatu kandidat politik baik itu calon legislatif (DPRD dan DPR) ataupun eksekutif (kepala daerah dan presiden) partai politik seharusnya mengutamakan kader-kadernya yang berkualitas, bukan malah memilih figur-figur yang dinilai mampu mendapatkan suara dan perhatian masyarakat padahal figur-figur itu bukanlah kader partai politik. Fenomena ini sering terjadi di Indonesia, khususnya dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada fenomena Pilkada Kabupaten Pati 2017. Partai-partai politik di Kabupaten Pati dinilai belum mampu melaksanakan fungsi rekrutmen dan kaderisasinya karena tidak mampu mengusung kader terbaik dari partainya. Delapan dari Sembilan partai malah lebih memilih mengusung Haryanto dan Saiful Arifin yang dinilai sudah dikenal oleh masyarakat karena Haryanto merupakan seorang petahana.

1.5.3. Pilkada dan Kandidasi

Pilkada

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan agenda rutin yang diselenggarakan untuk menentukan kepala daerah di setiap wilayah administratif baik itu kabupaten/kota ataupun provinsi di Indonesia. Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang (Perpu) nomor 10 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pada pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa "Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/ Kota untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung dan demokratis". Maka, atas dasar itulah prosesi pemilihan kepala daerah atau Pilkada selalu diselenggarakan secara langsung dan demokratis hingga kini.

Kandidasi dalam Pilkada

Pada setiap pilkada partai-partai politik akan melakukan proses pemilihan orang-orang yang dianggap pantas untuk ikut berkontestasi dalam Pilkada. Prosesi ini sering disebut sebagai proses kandidasi. Dalam proses kandidasi akan dipertimbangkan beberapa aspek atau dimensi untuk menilai siapa sosok yang lebih pantas diusung oleh suatu partai politik.

Menurut Matland (2005, hlm. 93) ada tiga tahap yang harus dilalui oleh seseorang untuk dapat direkrut dan dikandidasikan untuk menduduki sebuah

jabatan politik. Pertama adalah di level diri sendiri, yaitu seseorang harus menilai apakah dirinya pantas atau tidak untuk dikandidasikan dalam kontestasi Pilkada. Fase pertama ini sangat dipengaruhi oleh ambisi personal, sumber daya, dan peluang. Selanjutnya pada tahap kedua, seseorang harus dipilih oleh partai politik sebagai kandidat atau calon. Pada tahap ini pemimpin partai politik memiliki posisi paling strategis dalam memberikan keputusan politiknya. Pada tahap terakhir adalah seleksi calon oleh pemilih atau fase pemilihan oleh pemilih. Pada fase ini partai akan mempertimbangkan respon masyarakat dalam mengambil keputusan final untuk menentukan siapa kandidat yang diusungnya.

Menurut Randall dan Svasand (dalam Debora, 2014, hlm. 3) Terdapat 4 dimensi yang biasanya digunakan untuk melakukan proses kandidasi dengan mempertimbangkan kelembagaan partai politik. Dimensi-dimensi ini terdiri dari dimensi kesisteman (*systemness*), dimensi identitas nilai (*value infusion*), dimensi otonomi dalam pengambilan keputusan (*decisional autonomy*), dimensi pengetahuan atau citra publik (*reification*). Namun, semua dimensi itu tidak harus diterapkan secara bersamaan.

Dalam penerapannya di Indonesia biasanya partai politik hanya menerapkan dimensi kesisteman dan dimensi pengetahuan atau citra publik. Partai-partai politik dalam melaksanakan proses kandidasi mengacu pada mekanisme yang telah disepakati bersama yaitu AD/ART serta peraturan-peraturan yang mengatur persoalan Pilkada yang telah disepakati dalam rapat-rapatnya. Selain mengacu pada mekanisme yang disepakati bersama hal ini

menunjukkan penerapan dimensi kesisteman, Partai politik juga menentukan hasil dari proses kandidasi dengan mempertimbangkan dimensi lain yaitu dimensi pengetahuan atau citra publik. Apa yang direfleksikan publik atau masyarakat tentang seperti apakah sosok pemimpin yang diharapkan masyarakat di masa mendatang, menjadi penting untuk dikaji oleh partai politik dalam proses kandidasi yang dilakukan agar nantinya partai politik tidak melakukan kesalahan dalam menurunkan rekomendasinya pada kadernya (Debora, 2014, hlm. 3).

Menurut Matland (dalam Tuasuun, 2015, hlm. 33) pola proses kandidasi dibagi menjadi 3 tahapan. Tahap pertama adalah seleksi diri (*Ambition Resources*) yaitu sejauh mana seseorang berkeinginan untuk mengikatkan diri pada sistem politik dan mendapat pengakuan akan eksistensi diri dalam jabatan publik sehingga dirinya layak (*eligibles*). Kedua, seleksi partai yakni cara seseorang mampu menembus tim seleksi (*gatekeepers*) sehingga akhirnya orang tersebut dikandidatkan. Tahapan yang terakhir adalah pemilihan, basis dukungan yang dimiliki seorang calon kepala daerah nyatanya juga menjadi pertimbangan penting dalam tahap kandidasi ini.

Jadi berdasarkan teori-teori diatas dapat diambil inti mengenai kandidasi pada prosesi Pilkada. Kandidasi dalam hal ini dapat diartikan sebagai proses atau tahapan menjanging dan menyeleksi orang-orang atau kader-kader partai politik yang dianggap layak untuk diusung oleh partai politik dalam sebuah kontestasi Pilkada. Teori mengenai kandisi ini sangatlah

penting untuk meneliti fenomena Pilkada Kabupaten Pati 2017 yang hanya diikuti oleh satu pasang calon. Proses kandidasi yang dijalankan oleh partai-partai politik di Kabupaten Pati patut untuk dikaji mendalam.

1.5.4. Petahana (*Incumbent*), Calon Tunggal dan Idealitas Pemilu Demokratis

Calon petahana dalam pilkada merupakan calon kepala daerah yang pada periode sebelumnya telah menduduki jabatan tersebut. Calon petahana biasanya dianggap lebih kuat secara politik. Seperti yang diungkapkan Harjanto (dalam Hanafi, 2014, hlm. 12) bahwa bagi partai politik, petahana adalah mereka yang memiliki sumber daya politik, seperti kekuasaan, dana, ataupun jaringan yang lebih luas dalam masyarakat, hal ini dipandang sebagai potensi keunggulan untuk berkompetisi dalam Pilkada. Oleh karena itu tidak mengherankan jika kemudian partai politik akan mudah untuk mendukung siapapun yang dinominasikan oleh para petahana ataupun jika petahana itu berminat untuk mencalonkan diri kembali. Seperti fenomena yang terjadi pada Pilkada Kabupaten Pati 2017, dimana Haryanto yang merupakan petahana dianggap terlalu kuat bahkan tidak ada partai yang mengusung kandidat lain selain pasangan Haryanto-Arifin.

Harjanto (2011, hlm. 154) mengungkapkan asalkan petahana tidak memiliki masalah hukum besar yang membuatnya menjadi kendala dalam

kontestasi Pilkada, dapat dipastikan pengaruh mereka masih sangat besar karena mereka memiliki sumber daya politik yang kuat. Para petahana memang memiliki banyak keunggulan elektoral untuk memenangkan kompetisi politik lokal. Selain tentunya sudah dikenal luas, mereka ini bisa mempolitisasi birokrasi dengan iming-iming mutasi maupun promosi untuk mendukung kemenangannya. Mereka dapat juga menggunakan anggaran daerah untuk menyukseskan kampanyenya, biasanya dengan memanipulasi penggunaan anggaran yang jumlahnya selalu meningkat tajam mendekati masa Pilkada. Mereka juga selalu bisa memainkan proyek-proyek pemerintah daerah dan karenanya lebih mudah memobilisasi dukungan finansial dari pengusaha daerah untuk memenangkan mereka.

Mas'udi dan Kurniawan (2017, hlm. 450) Secara umum seorang petahana dalam pemerintahan lokal di Indonesia memiliki peluang besar untuk memenangkan kontestasi politik di daerah melalui pemanfaatan dan transaksi segala sumber daya yang ada. Mereka dapat mengontrol birokrasi, anggaran dan dapat memperbanyak dana kampanyenya dengan memanipulasi sumber dana yang ada atau dapat juga melakukan kesepakatan dengan pemodal yang merupakan pebisnis yang memiliki kepentingan dengan daerahnya.

Terlalu kuatnya calon petahana membuat posisi mereka sangat diunggulkan. Petahana dianggap sebagai posisi yang strategis oleh partai politik. Seperti fenomena yang terjadi dalam Pilkada Kabupaten Pati 2017, hampir semua partai politik menganggap calon petahana memiliki pengaruh

yang sangat kuat sehingga 8 dari 9 partai politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Pati lebih memilih mengusung petahana, hanya menyisakan Partai Nasdem yang hanya memiliki 4 kursi tidak memenuhi syarat untuk mengusung calon sehingga munculah pasangan calon tunggal dalam Pilkada Kabupaten Pati 2017.

Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 yang menjadi dasar aturan pelaksanaan Pilkada 2017 dalam pasal 54c ayat 1 mengatur tata pelaksanaan pilkada yang hanya diikuti oleh calon tunggal, pasal ini menyatakan bahwa apabila hanya ada satu pasang calon maka harus diadakan penundaan dan perpanjangan pendaftaran, setelah dilakukan penundaan dan sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran, hanya terdapat satu pasangan calon yang mendaftar dan berdasarkan hasil penelitian pasangan calon tersebut dinyatakan memenuhi syarat maka calon tersebut dapat disahkan menjadi calon tetap. Aturan ini jelas menyatakan bahwa calon tunggal diperbolehkan dalam Pilkada.

Meskipun dalam aturannya Pilkada yang diikuti calon tunggal dinyatakan sah, namun sebenarnya Pilkada yang diikuti oleh calon tunggal dapat disebut sebagai belum berhasilnya partai politik dalam menjalankan peran dan fungsinya utamanya dalam fungsi kaderisasi dan rekrutmen politik. Belum berhasilnya proses ini dapat pula dinyatakan sebagai pemilihan umum yang tidak ideal. Seperti yang diungkapkan oleh Ambardi (2008) suatu pemilihan umum yang diikuti oleh lebih dari satu calon merupakan suatu indikasi sistem kepartaian yang kompetitif. Dari pernyataan tersebut dapat

direfleksikan bahwa apabila suatu pemilihan umum yang diikuti hanya satu calon dapat menunjukkan bahwa partai-partai tidak mampu menerapkan sistem yang kompetitif. Hal ini menjadikan kompetisi dalam pemilu dapat dikatakan tidak ideal. Fenomena inilah yang terjadi dalam Pilkada Kabupaten Pati 2017 sehingga menarik untuk diteliti secara mendalam sehingga diketahui penyebab dibalik munculnya calon tunggal dalam kontestasi pemilihan kepala daerah.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Desain Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif agar mempermudah peneliti dalam melaksanakan pengumpulan data. Penelitian ini akan menggali secara mendalam mengenai pola rekrutmen dan kaderisasi politik yang dilakukan oleh partai-partai politik di Kabupaten Pati. Peneliti mencoba mengumpulkan data agar fenomena mengenai munculnya calon tunggal petahana dalam Pilkada Kabupaten Pati 2017 yang berhubungan dengan proses rekrutmen dan kaderisasi politik dapat ditemukan fakta sebenarnya agar fenomena serupa dapat diantisipasi pada Pilkada atau Pemilu selanjutnya. Moleong (2007, hlm. 6) mendefinikan penelitian kualitatif merupakan suatu desain penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain., secara utuh, dan dengan deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

1.6.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pati. Lokasi tersebut dipilih karena dianggap tempat paling tepat untuk menggali data secara mendalam tentang proses rekrutmen dan kaderisasi partai-partai politik di Kabupaten Pati.

1.6.3. Subjek Penelitian

Subjek utama dalam penelitian ini adalah pengurus DPC ataupun DPD Partai Politik Kabupaten Pati yang memiliki kursi DPRD Kabupaten Pati Periode 2014-2019 (PDI Perjuangan, Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, PKB, PKS, Partai Nasdem, Partai Hanura, PPP), serta konstituen atau pemilik suara yang terlibat dalam Pilkada Kabupaten Pati 2017. Penelitian ini juga menyertakan beberapa subjek lain yang terdiri dari aktivis dan tokoh masyarakat sebagai subjek sekunder agar data yang didapat menjadi lebih lengkap.

1.6.4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini berupa kata-kata tertulis, dan sebagian berupa angka. Adapun sumber data yang membantu penelitian ini berupa:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama yang langsung diteliti. Untuk mendapatkan data Primer dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara. Wawancara secara langsung dilakukan untuk mendapatkan informasi secara mendalam dengan mengacu pada panduan wawancara (*interview guide*) yang telah dirumuskan sebelumnya.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan semua data yang diperoleh melalui sumber sekunder seperti studi kepustakaan yaitu pengumpulan data dari buku referensi, jurnal, dan studi literatur lainnya yang sesuai dengan objek kajian penelitian dan permasalahan, yang dalam hal ini mengenai sistem rekrutmen dan kaderisasi partai politik yang nantinya dijadikan panduan dalam melakukan penelitian

1.6.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada pelaksanaan penelitian ini adalah:

1.6.5.1. Wawancara

Moloeng (2007, hlm. 186) mengungkapkan bahwa wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Suatu percakapan dapat dikatakan wawancara apabila percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Metode wawancara diharapkan dapat digunakan untuk memperoleh data primer yang tepat dan dapat dipertanggung jawabkan.

Narasumber atau informan yang dipilih sesuai dengan subjek penelitian, dimulai dari DPC Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Pati periode 2014-2019, Konstituen atau pemilik suara dalam Pilkada Pati 2017, yang dapat dikategorikan sebagai aktivis ataupun tokoh masyarakat.

DPC Partai Politik ini terdiri dari 8 partai yang mendukung pasangan Haryanto-Saiful Arifin yaitu PDI Perjuangan, Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, PKB, PKS, Partai Hanura, dan PPP, serta partai yang tidak mendukung pasangan Haryanto-Saiful Arifin yaitu Partai Nasdem. Informan dari DPC Partai politik dipilih agar data yang didapat mengenai proses rekrutmen dan kaderisasi partai-partai tersebut dapat diketahui secara jelas. Peneliti juga mencoba menggali informasi mengenai prosesi kandidasi yang dilakukan partai-partai tersebut hingga pada akhirnya diputusan sikap masing-masing partai untuk mendukung

ataupun tidak mendukung pasangan Haryanto-Saiful Arifin pada Pilkada Pati 2017.

Konstituen atau pemilik suara dalam Pilkada Kabupaten Pati 2017 dipilih dari beberapa golongan masyarakat untuk mengetahui sikap ataupun pandangan konstituen terhadap fenomena calon tunggal pada Pilkada Kabupaten Pati. Konstituen juga diharapkan dapat memberi informasi bagaimana sikap politik mereka dalam Pilkada Pati 2017. Pemilihan informan dari konstituen ini dipilih secara purposif untuk mewakili beberapa kelompok atau golongan masyarakat di Kabupaten Pati.

Peneliti juga menyertakan narasumber dari kalangan ahli dalam bidang politik. Mereka adalah aktivis yang mampu memobilisasi massa dan memiliki sikap tertentu di dalam Pilkada Pati 2017. Aktivis ini dapat pula disebut sebagai pengamat politik. Para pengamat politik ini dipilih untuk memberikan data-data pendukung untuk penelitian ini yang berupa tanggapan terhadap fenomena calon tunggal dalam Pilkada Pati 2017. Peneliti berharap narasumber dari kalangan pengamat politik dapat memberikan analisis yang tepat secara politik terhadap fenomena calon tunggal yang terjadi pada Pilkada Pati 2017.

1.6.5.2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data dengan cara mencari informasi dari catatan atau data yang sesuai dengan topik penelitian melalui dokumen yang tertulis. Dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini adalah dokumen yang berupa arsip data yang dimiliki oleh partai politik. Dokumen ini berupa foto, ataupun data mengenai prosesi rekrutmen dan kaderisasi partai politik khususnya dalam hal kandidasi calon untuk Pilkada Pati 2017.

1.6.6. Pengolahan Data

Dalam penelitian ini, pengolahan data dilakukan dengan kegiatan-kegiatan berikut:

1.6.6.1. Recording

Recording merupakan proses merekam, mendokumentasikan dan menyimpan semua data yang diperoleh di lapangan, baik merekam semua kejadian dan fakta yang ada, serta mencatat sebagian ataupun dengan mengingat kejadian di lapangan yang berhubungan dengan objek penelitian.

1.6.6.2. Editing

Editing adalah proses memeriksa data yang diperoleh untuk menjamin ketepatan data tersebut, pemeriksaan dilakukan apabila ada kesalahan yang terletak pada penulisan dan diperiksa kembali.

1.6.6.3. Presenting

Presenting yaitu mempersembahkan atau menampilkan data-data yang telah diperoleh dan diperiksa untuk lebih mempermudah dalam penyusunan dan penyajian data.

1.6.7. Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data menurut Bodgan dan Biklen (dalam Moloeng, 2007, hlm. 248) adalah upaya yang dilakukan dengan data, mengorganisasikan data, emilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat disampaikan kepada orang lain. Analisis dan interpretasi data menurut Moloeng (2007, hlm. 247) terdiri dari telaah data, reduksi data, koding, dan memeriksa keabsahan data. Penjelasan dari tahapan-tahapan tersebut sebagai berikut:

1.6.7.1. Telaah Data

Menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumentasi, gambar, foto, dan lain sebagainya.

1.6.7.2. Reduksi Data

Reduksi data dilakukan cara melakukan abstraksi yang merupakan usaha membuat rangkuman inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada didalamnya.

1.6.7.3. Keabsahan Data

Setelah melakukan beberapa tahapan sebelumnya, langkah terakhir adalah menarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan tergantung pada kasarnya kumpulan catatan-catatan dilapangan. Analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Pendekatan kualitatif ini berusaha mengungkapkan kenyataan sosial secara keseluruhan, utuh, dan tuntas sebagai satu kesatuan kenyataan, objek penelitian dilihat sebagai kenyataan hidup yang dinamis, memiliki pikiran dan perasaan serta subjektivitas yang unik sehingga data yang diperoleh tidak harus berupa angka-angka atau data-data yang bisa diungkapkan, tetapi lebih banyak deskripsi, ungkapan atau makna-makna tertentu yang harus diungkapkan peneliti.